

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis deskriptif dan analisis inferensial menggunakan metode SEM berbasis Partial Least Square (PLS), maka ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Akuntabilitas Pelaporan Keuangan berada pada kategori baik. Nilai koefisien determinasi menunjukkan bahwa kontribusi variabel Kualitas DAPODIK, Variabel Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS), dan Variabel Kompetensi Pengelola Keuangan Sekolah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan sebesar 70.6%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. Hal ini bermakna bahwa semakin baik Kualitas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Sekolah maka semakin baik Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Semakin baik Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) maka semakin baik Akuntabilitas Pelaporan Keuangan begitu juga Semakin Baik Kompetensi Pengelola Keuangan maka semakin baik Akuntabilitas Pelaporan Keuangan. Hasil ini sekaligus menerima Hipotesis Pertama
2. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa kualitas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) berada pada kategori baik, sedangkan Hasil uji statistik menunjukkan bahwa kualitas dari Data Pokok Pendidikan

(DAPODIK), tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini bermakna apabila Kualitas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) masing-masing satuan Pendidikan semakin berkualitas maka akan mempengaruhi Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas. Artinya semakin berkualitas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) satuan pendidikan maka, maka Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas semakin baik.

3. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) berada pada kategori baik, sedangkan Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini bermakna apabila Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) tersusun secara baik maka akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas. Artinya semakin baik Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) maka Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas semakin baik.
4. Hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Kompetensi Pengelola Keuangan pada Satuan Pendidikan berada pada kategori baik, sedangkan Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Kompetensi Pengelola Keuangan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan. Hal ini bermakna apabila Kompetensi Pengelola Keuangan semakin baik maka akan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas. Artinya semakin baik Kompetensi Pengelola Keuangan maka Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas semakin baik.

5.2. Saran

Sesuai hasil analisis deskriptif dan uji hipotesis serta kesimpulan di atas maka disarankan sebagai berikut:

1. Dalam upaya peningkatan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, diharapkan dapat memberikan perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas DAPODIK satuan Pendidikan, Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) dan juga Kompetensi Pengelola Keuangan.
2. Mendorong peningkatan Kualitas DAPODIK secara khusus terhadap indikator *Mutakhir* yang berdasarkan hasil analisis statistik deskripsi mendapat nilai rendah. Perhatian Dinas dengan memberikan dorongan melalui arahan dan petunjuk resmi secara intensif kepada sekolah agar melakukan pemutakhiran terhadap seluruh entitas yakni data Sekolah, Peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), dan data Sarana Prasarana secara periodik dengan melakukan pengiriman data terbaru atau *Updating Data* yang disesuaikan dengan setiap perubahan dan kondisi terkini yang ada di sekolah.
3. Mendorong peningkatan Kualitas RKAS dan Kompetensi Pengelola Keuangan Sekolah, secara khusus terhadap indikator *Berdasarkan Hasil Evaluasi Diri Sekolah* dari Variabel RKAS dan indikator *Pemahaman dan Nilai* dari Variabel Kompetensi Pengelola Keuangan Sekolah yang berdasarkan hasil analisis mendapatkan nilai terendah perlu untuk dilakukan sosialisasi, dan bimbingan teknis secara intensif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- J.B. Gharthey, 1998, *Decentralisation Transparency Social Capital and Development*, Massachusetts.
- Lembaga Administrasi Negara. 1999. *Pedoman Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta
- S. Munawir, 2000, *Analisa Laporan Keuangan* Yogyakarta: Liberty
- Ryan, C., T. Stanley dan M. Nelson. 2002. Accountability Disclosures by Queensland Local Government Councils: 1997-1999. *Financial Accountability and Management*, 18 (3): 261-289.
- Rasul, Syahrudin. 2002. *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*. Jakarta: Detail Rekod.
- Ledvina V. Carino, 2002, *Administrative Accountability*, San Francisco State University Fall.
- Ferdinand. 2002. *Metode Penelitian Manajemen : Pedoman penelitian untuk Skripsi, Tesis, dan Desertasi Ilmu Manajemen*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Steccolini, Ileana. (2002). "Local Government Annual Report: an Accountability Medium?. EIASM Conference on Accounting and Auditing in Public Sector Reforms." Dublin. September 2002. Hlm. 1-30
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Rasul, Sjahrudin. (2003), *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran Dalam Perspektif UU No. 17/2003 Tentang Keuangan Negara*, Perum Percetakan Negara Indonesia, Jakarta
- Lalolo Krina P, Loina. Dra. 2003. *Sekretariat Good Public Governance*. Bappenas. Indikator Pemerintah : Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi. Hal 25
- Ambar Teguh Sulistiyani dan Rosidah, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Lalolo, Loina. 2003. Indikator & Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi & Partisipasi, Jakarta : Sekretariat Good Public Governance Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Riduwan. 2004. *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*. Cetakan Pertama. Bandung- Alfabeta.

- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Andi.
- Havesi, G. Alan. 2005. *Standards For Internal Control In New York State Government*. www.osc.state.ny.us
- Lembaga Administrasi Negara. 2007. *Modul Manajemen Strategis dalam Proses Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Jakarta : LAN
- Hutapea, Parulian dan Nurianna Thoha, 2008, *Kompetensi Plus : Teori, Desain, Kasus dan Penerapan untuk HR dan Organisasi yang Dinamis*, Penerbit : Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Jaya, I Gede Nyoman Mindra., Sumertajaya, I Made. 2008. *Pemodelan Persamaan Struktural Dengan Partial Least Square*. *Semnas Matematika dan Pendidikan Matematika*.
- Scott WR, 2009. *Financial Accounting Theory. Fourth Edition*. Toronto, Ontario: Pearson Education Canada Inc.
- Muhaimin, dkk. (2009). *Manajemen Pendidikan: Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah/ Madrasah*. Jakarta: Kencana.
- Moeheriono. (2009). *Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi: Competency Based Human Resource Management*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Martiningsih, S. P. 2009. *Studi Kebutuhan Informasi Pengguna Laporan Keuangan Pemerintah* *Simposium Nasional Akuntansi 12*.
- Mulyono. (2010). *Konsep Pembiayaan Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ulum, Ihyaul, 2010. *Akuntansi Sektor Publik*, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sutrisno Edy. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Cetakan Pertama. Jakarta : Penerbit Kencana
- Permana Irvan. 2012. *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya pada Akuntabilitas*. Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. (Bandung: ALFABETA)
- Levis, 2013, *Metode Penelitian Perilaku Petani*. Kupang. Penerbit Ledalero
- Halim. A dan M.S. Kusufi, 2013, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2013. *Pernyataan Standar Keuangan 01 : Penyajian Laporan Keuangan (Revisi 2013)*. Jakarta : IAI

Ghozali, Imam. 2014. *Structural Equation Modeling Metode Alternatif Dengan Partial Least Squares (PLS)*. Edisi 4. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.

Abdillah, W., Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS)*. Yogyakarta: Andi.

Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung:PT Alfabet.

Santosa, 2018, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Yogyakarta. Penerbit Andi

Jurnal:

Noah De Lissovoy & Peter McLaren, 2003, *Journal of Education Policy* Volume 18, Issue 2, *Educational 'accountability' and the violence of capital: a Marxian reading*

Mack, Janet and Christine Ryan. 2006. Reflections on the Theoretical Underpinnings of the General- Purpose Financial reports of Australian government Departments, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*. Vol. 19 No. 4, pp. 592-612.

Tuti Herawati. 2014. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan(Survei Pada Organisasi Perangkat Daerah Pemda Cianjur)*. STAR – Study & Accounting Research | Vol XI, No. 1 – 2014

Lia Hanifa. 2016. *Pengaruh Kompetensi Pengelola Keuangan Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan*. Volume 1. Nomor 2. 2016

Suryanto. 2017 *Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia*. Volume 5 / Nomor 1. 2017

Heni Suhartini. 2017. *Pengaruh Pelaksanaan Kebijakan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah Terhadap Manajemen Sekolah dalam Mewujudkan Efektifitas Penggunaan Anggaran Dana Sekolah*. Vol. 01. No. 01. 2017

Mesi Putri Yenti, Armel Yentifa, dan Rasyidah Mustika. 2018. *Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Komite Pada Sma Negeri 9 Sijunjung*. Vol.13, No.1, 2018

Welem Aliando Takasihaeng, Novie R. Pioh, dan Welly Waworundeng. 2019. *Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Dalam Pembangunan Tahun 2017 Di Desa Barangka Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe*. Volume 3. Nomor 3. 2019

Regulasi:

- Pemerintah Indonesia, 1999. *Undang-Undang No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2003. *Undang-Undang No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2003. *Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2004. *Undang-Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2005. *Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2006. *Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Depdiknas, 2007. *Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah*. Depdiknas. Jakarta.
- Pusdiklatwas BPKP. 2011. "Modul Akuntabilitas Instansi Pemerintah' Edisi Keenam (Revisi Kelima). Bogor.
- Pemerintah Indonesia, 2014. *Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2014. *Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Kemdikbud. (2015). *Peraturan Menteri Pendidikan Indonesia Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan*. Kemdikbud. Jakarta.
- Pemerintah Indonesia, 2018. *Peraturan Kementerian Keuangan (PMK) No. 102/PMK.02/2018 tentang Klasifikasi Anggaran*. Sekretariat Negara. Jakarta.